

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Tanjungjaya dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjungjaya untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026

harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan Tanjungjaya.

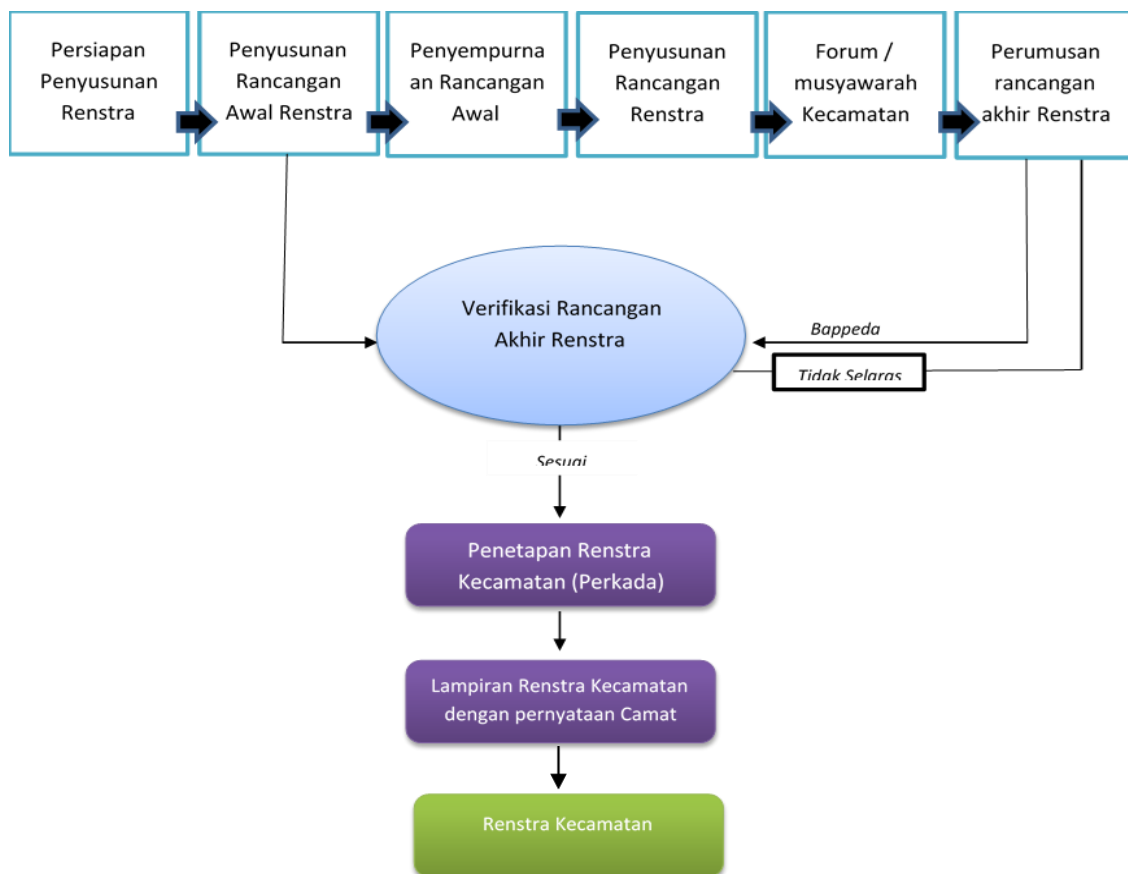
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tanjungjaya.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

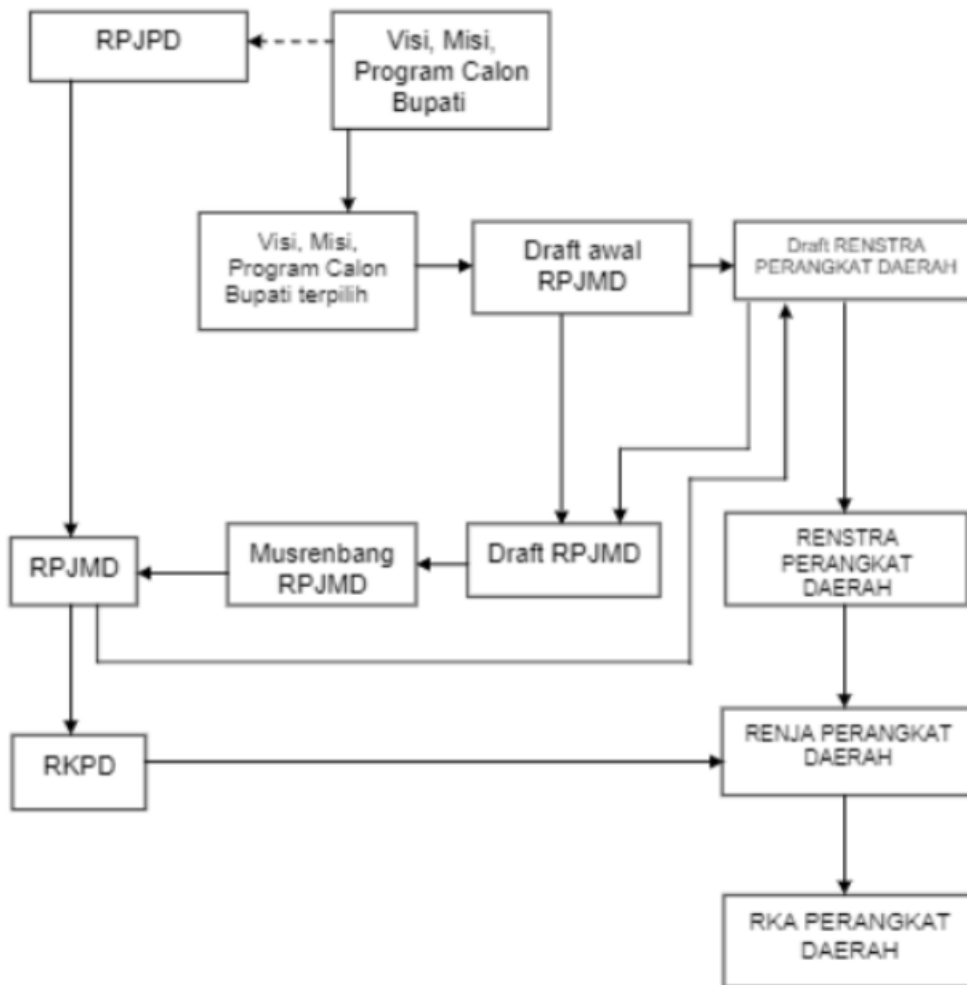
Gambar -1

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026



Keterangan : Gambar 1.1

Bagan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain



Keterangan : Gambar 1.2

1.2 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota

- Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

30. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Tanjungjaya;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungjaya, sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjungjaya, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Tanjungjaya.

- 2.1 Aspek Geografis
 - 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah administrasi
 - 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
 - 2.1.4 Kondisi Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tanjungjaya; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Target dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.2.1 Visi
 - 3.2.2 Misi
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.1.1 Tujuan
 - 4.1.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tanjungjaya, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGGAYA

2.1 Aspek Geografis

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Tanjungjaya adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Tanjungjaya ini terbentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001, semula Kecamatan Tanjungjaya membawahi Kamantren Sariwangi dan Kamantren Padakembang, dan dimekarkan menjadi Kecamatan. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

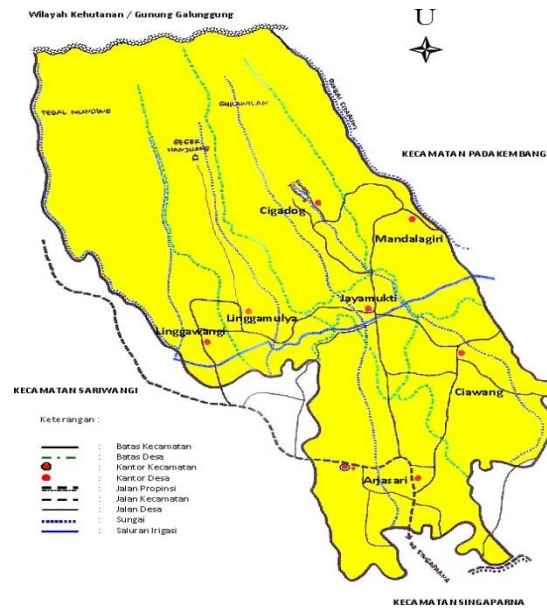
Kecamatan Tanjungjaya adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya berada pada ketinggian 455– 599 dpl, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Sukarame
- Selatan : Kecamatan Sodong Hilir
- Barat : Kecamatan Mangunreja
- Timur : Kecamatan Mangunreja

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Tanjungjaya secara administratif meliputi 7 (Tujuh) Desa dengan luas wilayah \pm 2.379,373 Ha, curah hujan per tahun sebesar 406,25 Mm/tahun dengan iklim tropis suhu berkisar antara 26 derajat Celcius dan kelembaban antara 61 %-73%.

PETA KECAMATAN TANJUNGGAYA



Peta Administrasi Kec. Tanjungjaya

Gambar 2.1

2.1.3 Wilayah rawan Bencana

Daerah yang dianggap rawan bencana adalah Desa Cigadog karena berada sangat dekat dengan kaki gunung Galunggung

2.1.4 Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kec. Tanjungjaya adalah 44.359 orang yang terdiri dari Laki – laki sebanyak 22.159 orang dan perempuan sebanyak 22.203 orang.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dengan luas wilayah 2.379.373 hektar maka kepadatan penduduk per hektar nya adalah sebesar 15,92 penduduk bila dirinci per desa maka Desa Jayamukti adalah desa terpadat dengan 24.42 penduduk per hektar.

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Desember 2020 jumlah penduduk Kecamatan Tanjungjaya sebanyak 37.156 jiwa, maka kepadatan penduduk per hektar adalah sebesar 15,92 penduduk. Apabila melihat data penduduk per Desa jelas kelihatan ada Desa yang penduduknya terpadat dan ada penduduk Desa terjarang adalah dengan kepadatan penduduk per hektar sebesar 8,43 penduduk.

d. Sex Ratio

Dari komposisi jumlah penduduk Kecamatan Tanjungjaya yang tersebar di 7 (tujuh) Desa, maka sex ratio penduduk Kecamatan Tanjungjaya sebesar 104.26.

e. Rasio Kebergantungan

Komposisi umur penduduk suatu wilayah dapat berhubungan dengan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil Dependency Ratio, maka semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Di Kecamatan Tanjungjaya Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 25.477 jiwa, maka yang menjadi tanggungannya adalah jumlah penduduk kelompok usia kurang dari 15 tahun sebanyak 1.334 jiwa, dan jumlah penduduk kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 1.805 jiwa.

2.2 Aspek Pelayanan Umum

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Tanjungjaya Dari aspek demografi penduduk Kec. Tanjungjaya berjumlah 44.359 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 22.156 jiwa dan Perempuan berjumlah 22.203 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Tanjungjaya terdiri dari Taman Kanak-Kanak 9 sekolah SD/Sederajat sebanyak 23 SMP/Sederajat sebanyak 5, SMA/Sederajat sebanyak 4. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Tanjungjaya terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Tanjungjaya terdapat Toko kelontongan 118 buah, kios/warung 111 buah, perbankan/BRI 1 buah, KUD 1 buah, koperasi berbadan hukum 3 buah, bengkel mobil 1 buah, bengkel motor 17 buah, reparasi elektronik 8 buah, sewa alat pesta 10, toko bangunan/material 16 buah, showroom motor 2 buah, Photocopy 7 buah, pangkas rambut 9 buah dan bengkel las 3 buah.

2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Tanjungjaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di urusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kec. Tanjungjaya, dengan penyusunan Renstra ini diharapkan Penerapan Standar pelayanan Minimal dapat dijalankan dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal.

2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

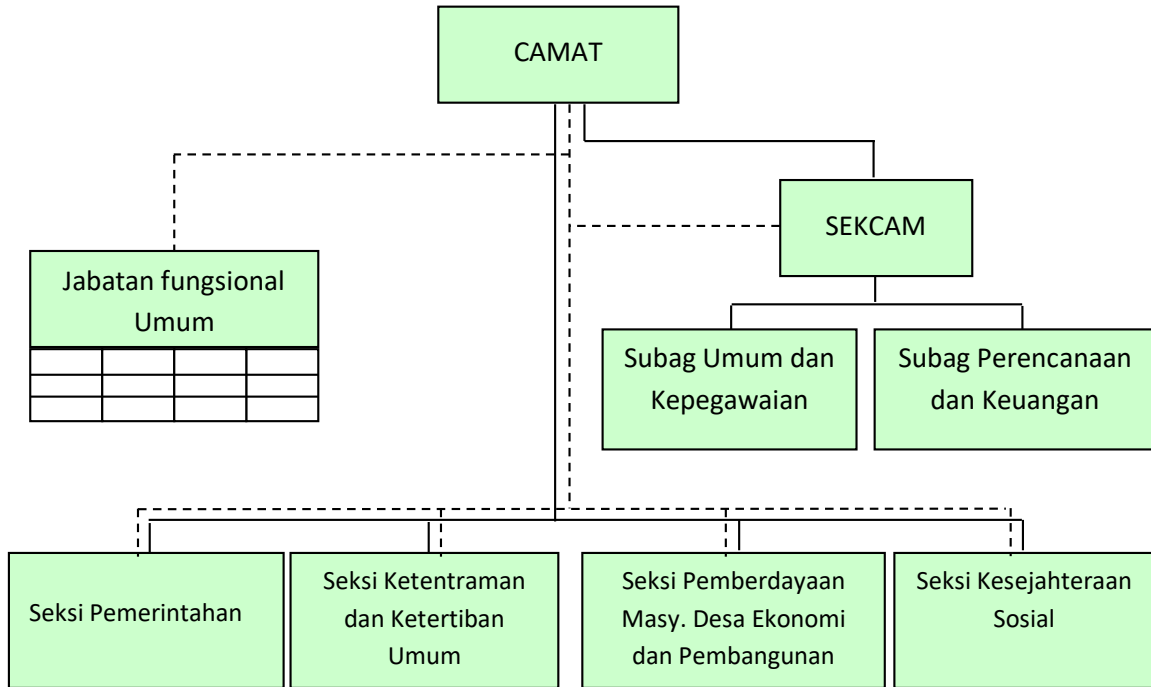
Berdasarkan Peraturan Bupati Tsikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar – 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
 - m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
 - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP);

- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah ;

- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan persiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan persiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosialserta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk msyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

(8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.5 Sumber Daya Kecamatan Tanjungjaya

2.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 4 (empat) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Tanjungjaya

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	JenisKelamin	a. Laki-laki	10
		b. Perempuan	2
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	6
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	5
		d. IV	2
4.	StatusPegawai	a. ASN	12
		b. NonASN	5
5.	Jabatan	a. Struktural	10
		b. FungsionalUmum	-
		c. FungsionalTertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tanjungjaya

2.5.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjungjaya

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Tanjungjaya.

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	Bangunan		
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	0	-
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir	2	Baik
	Kendaraan		
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	3/2/3	Baik/Sedang/Rusak
	Non Kendaraan		
7	Personal Computer (PC)	1/1	Baik/Rusak
8	Laptop	3/2	Baik/Rusak
9	Printer	2	Baik
10	Faximile	-	-

11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid	-	-
14	Wereless	1	Baik
15	Scanner	1	Rusak
16	Lemari	1	Baik
17	Filling Kabinet	1	Baik
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Baik
20	Kursi Tamu Kayu	2	Baik
21	Tempat Tidur Kayu	1	Sedang
22	Meja Tulis	4	Baik
23	Meja Tulis	10	Sedang
24	Meja podium	-	-
25	Kursi Rapat / lipat	37	Sedang
26	Kursi Putar	1	Baik
27	Proyektor	1	Rusak
28	Meja Pelayanan	1	Baik
29	Kursi Tunggu	-	-
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Sound Sistem	-	-
32	Rak Arsip	2	Baik
33	CCTV	1 Set	Baik
33	Rak Buku/ Perpustakaan	-	-

2.6 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tanjungjaya pada Tahun 2016-2020 menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Tanjungjaya berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tanjungjaya periode sebelumnya pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada tahun ke					Realisasi Capaian pada tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				80,00	80,20	80,40	80,60	80,80	80	81	82,00	83,00	80,90	100,00	100,99%	101,99%	102,98	100,12%
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2016 - 2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	1.959.716.920	2.167.211.566	2.244.733.605	2.241.509.305	2.155.311.256	1.852.678.113	1.933.356.144	2.148.192.090	2.165.635.908	2.121.473.663	0,95	0,89	0,96	0,97	0,98	260.242.873	301.917.234
Belanja Tidak Langsung	1.613.277.770	1.623.241.663	1.711.656.601	1.809.045.000	1.813.397.000	1.446.575.585	1.386.759.251	1.627.256.275	1.737.701.145	1.710.709.284	0,90	0,85	0,95	0,96	0,94	196.855.230	284.377.595
1. Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	1.261.052.257	1.275.397.000	1.183.905.000	1.163.745.000	1.168.097.000	1.139.675.585	1.066.541.314	1.037.327.431	1.114.646.173	1.134.129.590	0,90	0,84	0,88	0,96	0,97	(96.219.257)	(20.158.558)
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	348.745.513	347.844.663	527.751.601	645.300.000	645.300.000	306.900.000	320.217.937	589.928.844	623.054.972	576.579.694	0,88	0,92	1,12	0,97	0,89	296.554.487	304.536.153
Belanja Langsung	438.919.152	543.969.903	533.077.004	432.464.305	341.914.256	406.102.528	546.596.893	520.935.815	427.934.763	410.764.379	0,93	1,00	0,98	0,99	1,20	(29.092.359)	17.539.639
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.883.400	73.433.400	74.345.400	77.232.700	74.345.400	72.079.271	73.445.485	71.959.117	73.359.098	69.054.848	0,98	1,00	0,97	0,95	0,93	2.627.475	203.765
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.300.000	18.957.000	18.957.000	18.957.000	16.197.071	18.312.085	16.570.717	15.128.248	12.824.057	0,90	1,00	0,87	0,80	0,68	957.000	(1.644.871)
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000				1,00	1,00					
2. Penyediaan ATK	8.000.000	8.000.000	7.995.000	10.182.300	7.995.000	8.000.000	8.000.000	7.995.000	10.181.600	8.839.091	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1.635.475	1.845.973
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.023.400	5.023.400	5.253.400	5.253.400	5.253.400	5.023.200	5.023.400	5.253.400	5.209.250	5.251.700	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	230.000	196.663
4. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
6. Penyediaan Makanan dan minuman	9.650.000	9.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	9.650.000	9.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.830.000	2.830.000
7. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(1.500.000)	(1.500.000)
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	10.350.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	10.349.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.475.000	1.476.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.035.752	207.086.503	309.281.604	184.781.605	114.781.606	89.436.657	211.313.908	298.938.098	184.747.310	189.138.611	0,81	1,02	0,97	1,00	1,65	56.245.853	96.408.478
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	25.450.000	22.000.000		25.000.000	9.000.000	25.450.000	21.158.149		24.999.000	1,00	1,00	0,96		1,00	(2.750.000)	(2.750.250)
2. Pengadaan Meubelair	14.500.000					1.450.000					0,10						
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.399.250	5.500.000	11.345.100	39.965.100	8.845.100	11.392.250	11.400.100	11.340.740	39.965.100	58.845.100	1,00	2,07	1,00	1,00	6,65	20.785.850	33.292.850

4.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	62.459.400	69.369.800	70.203.200	70.602.200	94.994.500	0,88	0,98	0,99	1,00	1,34	-	14.240.875	
5.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.500.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	5.135.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1.050.000	1.415.000	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.	Rehabilitasi Berat/ringan Gedung Kantor / Tempat Parkir/Pemagaran Gedung		100.000.000	200.000.000	68.880.000			99.594.000	190.936.000	68.880.000			1,00	0,95			51.660.000	51.660.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	0	-	-	-	-	0	-				#DIV/0!		-	-	
Belanja Pakaian Batik tradisional															#DIV/0!		-	-	
Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD		10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	1,00					(10.000.000)	(10.000.000)	
1.	Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000					10.000.000					1,00					(10.000.000)	(10.000.000)	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750	
Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah						10.000.000					9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750	
Program Pemantauan dan Kegiatan pengevaluasian serta pelaporan Pembangunan Daerah		37.000.000	32.000.000	28.500.000	48.500.000	20.837.250	36.993.000	31.747.500	28.499.600	48.347.200	20.832.725	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	4.584.313	4.475.581	
1.	Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.937.250	29.993.000	25.000.000	24.999.600	24.955.600	5.937.250	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(9.765.688)	(9.791.988)	
2.	Evaluasi APBDes	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	6.747.500	3.500.000	3.406.000	3.496.450	1,00	0,96	1,00	0,97	1,00	(3.500.000)	(3.571.388)	
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik					1.400.000					1.400.000					1,00	350.000	350.000	
4.	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa				20.000.000	10.000.000				19.985.600	9.999.025					1,00	1,00	17.500.000	17.488.956
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa		35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.467.500)	
1.	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.467.500)	
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan		125.000.000	150.000.000	75.000.000	76.000.000	76.000.000	119.634.600	148.640.000	74.790.000	75.981.505	75.998.520	0,96	0,99	1,00	1,00	1,00	(49.000.000)	(43.648.841)	
1.	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	25.999.370	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000	999.843	
2.	Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	94.634.600	98.640.000	49.790.000	49.981.505	49.999.150	0,95	0,99	1,00	1,00	1,00	(50.000.000)	(44.648.684)	
Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah		12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	14.249.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1,00	1,02	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759	
1.	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	13.950.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759	

Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	-	(301.990)
1. Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	-	(301.990)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	4.000.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,14	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.363)
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	4.000.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,00	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.363)

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjungjaya

Kecamatan Tanjungjaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tanjungjaya 5 (lima) tahun kedepan di antaranya :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tanjungjaya harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Tanjungjaya, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Tanjungjaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tanjungjaya, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Tanjungjaya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN TANJUNGPURA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungpura

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungpura selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpura, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Tanjungpura 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Tanjungpura belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Tanjungpura;
5. Belum optimalnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.
6. Masih adanya kelemahan pembinaan dari atasan langsungnya masing-masing dalam memberikan arahan/ccontoh yang baik.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanjungpura

dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut bagian dan seksi di Kecamatan Tanjungjaya antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
 - b. Pengelolaan data administrasi pemnuhan administrasi kependudukan;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
 - b. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan
 - c. Masih kurangnya pengadaan logistik dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan perijinan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forumkecamatan;
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunanwilayah;
 - b. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas dikecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupunmasyarakat.

- d. Belum adanya pengembangan kewilayahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat
 - e. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa yang dibiayai oleh Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan tentang bantuan social dari mulai BST, BPNT dan BLT secara basis data belum terlaksana secara optimal
 - c. Kurangnya peran serta para tokoh alim ulama dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.
5. Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Kurang pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan
 - b. Kurangnya partisipasi dalam pemenuhan mewujudkan terciptanya pelayanan yang baik contoh dalam pengisian questioner SKM yang berpengaruh pada nilai IKM kecamatan
 - c. Belum terpenuhinya ketepatan sasaran bagi pegawai yang diberikan penghargaan baik dalam pemberian penghargaan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.
 - d. Belum terlaksananya pemberian teguran atau hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan sesuai disiplin pegawai yang sesuai dengan PP 53 Tahun 2010

- e. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap aturan pokok-pokok kepegawaian

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : **1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang

dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baladun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baladun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Tabel 3.1
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/ Islami</i>	Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatkannya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional,	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Regional, dan Global	

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-

2031, dimana Kecamatan Tanjungjaya menurut tata ruang memiliki potensi diberbagai bidang diantaranya : Bidang Peternakan yaitu peternakan Kambing, bidang perkebunan yaitu Kawasan komoditas cabe, kawasan pertambangan mineral, di bidang industri kerajinan yaitu kerajinan bambu, industry border, industry makanan yang kesemuanya itu merupakan potensi Kecamatan Tanjungjaya yang perlu dikembangkan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isustrategis Kecamatan Tanjungjaya adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat ;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Tanjungjaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Tanjungjaya melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjungjaya selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC	CC	CC	BB	BB	BB	B	B
2	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9%	81%	81,05%	82%	82,05%	83%	83,05	83,05%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Tanjungjaya dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa ;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab.Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan

koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

B. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakandalammengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kec. Tanjungjaya sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa;

5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lewwisari
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

VISI :	: Dengan Semangat Gotong royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan sejahtera		
MISI 2	: Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tanjungjaya guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengeralahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Tanjungjaya. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjayasebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETERANGAN			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Misal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan																Pd Kecamatan Leuwisari		
		7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen																
		7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	10.000.000	4 Dot	15.000.000	4 Dot	15.000.000	4 Dot	15.000.000	4 Dot	15.000.000	4 Dot	15.000.000	
		7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	-	-	10.000.000	20 Dot	15.000.000	20 Dot	15.000.000	20 Dot	15.000.000	20 Dot	15.000.000	20 Dot	15.000.000	
		7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-											
		7	01	001	2.02	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai peraturan	%																
		7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	%	100%	1.829.661.747	100%	1.829.661.747	100%	1.829.663.000	100%	1.829.664.000	100%	1.829.665.000	100%	1.829.675.000	100%	1.829.675.000	
						Administratif Kependidikan Perangkat Daerah	Catupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	%/Orang																
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/dilayak sosialisasi/ workshop/diseminasi/capacity building	Orang	-	-	-	14	5.000.000,00	14	5.500.000,00	14	6.000.000,00	14	6.500.000,00	14	700.000,00	14	700.000,00	
		7	01	001	2.06	Administratif Umum Perangkat Daerah	Catupan pelayanan administrasi umum	%																
		7	01	001	2.06	002	Penyediaan Perawatan dan Perawatan Kamar	Terpenuhiya kebutuhan perawatan dan perlengkapan kamar	Bulan	12	40.025.300	12	39.970.300	12	40.110.000	12	40.120.000	12	40.130.000	12	40.140.000	12	40.140.000	
						002	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Terpenuhiya kebutuhan bahan baku dan perawatan perundang-undangan	Bulan	12	3.589.000	12	3.240.000	12	3.650.000	12	3.660.000	12	3.670.000	12	3.680.000	12	3.680.000	
		7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetak dan pengadaan	Bulan	12	12.041.600	12	12.041.600	12	12.110.000	12	12.120.000	12	12.130.000	12	12.140.000	12	12.140.000	
		7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhiya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.360.000	12	3.360.000	12	3.410.000	12	3.420.000	12	3.430.000	12	3.440.000	12	3.440.000	
		7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Bulan	12	34.540.000	12	33.095.000	12	34.555.000	12	34.556.000	12	34.557.000	12	34.558.000	12	34.558.000	
		7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan kebutuhan kamar	%																
		7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	-	4	16.680.000	4	16.685.000	2	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Jenis	-	2	29.150.000	2	29.150.000	2	29.150.000	2	29.150.000	2	29.150.000	2	29.150.000	2	29.150.000
		7	01	001	2.07	011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	-	3	11.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%																
		7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12	17.688.000	12	17.688.000	12	17.710.000	12	17.720.000	12	17.730.000	12	17.740.000	12	17.740.000	
		7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kamar	Jasa cleaning service	OB		15.219.600,00	1	12.000.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	13.500.000	1	14.000.000	1	14.500.000	
							Jasa tenaga pengaman	OB	7	10.500.000	5	12.000.000	5	12.500.000	5	13.000.000	5	13.500.000	5	14.000.000	5	14.500.000		
							Jumlah tenaga pengemudi	OB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah tenaga administrasi	OB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%																
		7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	7	90.636.500	7	80.677.000	7	90.650.000	7	90.660.000	7	90.670.000	7	90.680.000	7	90.680.000	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pegawai	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang tepat bayar pajak	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pegawai	Jumlah kendaraan dinas operasional/pegawai yang terpelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pegawai	Jumlah kendaraan dinas operasional/pegawai yang tepat bayar pajak	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin lainnya	Jumlah perawatan dan mesin lainnya	Bulan	-	-	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	Jenis	2	31.523.000	2	33.463.200	2	31.540.000	2	31.550.000	2	31.560.000	2	31.570.000	2	31.570.000	

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan	7	1	2	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan																PD Kecamatan Leuwisari	
		7	01	002	1.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dotumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dotumen															
		7	01	002	1.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	Bulan															
		7	01	002	1.01	002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan															
		7	01	002	1.02	001	Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan	Bulan														
		7	01	002	1.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan	Bulan														
		7	01	002	1.04	001	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilampirkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	Bulan														
		7	01	002	1.04	001	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	Bulan														
		7	01	002	1.04	001	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilampirkan	Laporan Monev PBB	Bulan														
		7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai ketentuan															PD Kecamatan Leuwisari
		7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pemerintah desa terkait money dan pembinaan	Desa														
		7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Monev bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dotumen														
								Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	Desa														
		7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Kertertiban Umum yang di tindak lanjuti															PD Kecamatan Leuwisari
		7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan kertertiban umum	Bulan														
		7	01	004	2.01	001	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenaga Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan kertertiban umum	Bulan														
		7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan														
		7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan kertertiban umum	Bulan														
		7	01	004	2.02	001	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan kertertiban umum	Bulan														
		7	01	005			PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum															PD Kecamatan Leuwisari
		7	01	005	1.01		Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Usulan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															
		7	01	005	1.01	001	Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi dan Organisasi Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengabdian Masyarakat, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakannya	Kegiatan														
		7	01	005	1.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakannya	Kegiatan														
		7	01	005	1.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar umat dan Inklusif, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna Merwujudan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakannya	Kegiatan														
		7	01	005	1.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Fortopitcam yang dilaksanakannya	Kegiatan														
		7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen														PD Kecamatan Leuwisari
		7	01	006	1.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Persen														
		7	01	006	1.01	001	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pembinaan cara penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa														
		7	01	006	1.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Desa														
		7	01	006	1.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa														
		7	01	006	1.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa														

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	CC	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,90	81,00	81,05	82,00	82,05	83,00	83,05	83,05

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Tanjungjaya selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanjungjaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Tanjungjaya, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada dilingkungan Kecamatan Tanjungjaya.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana

Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;

3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Tanjungjaya harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tanjungjaya (RKA-Kecamatan Tanjungjaya).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Tanjungjaya dan diluar dari Renstra inimaka akan dilakukan perbaikan danperubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Tanjungjaya Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungjaya, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, Agustus 2021

Camat Tanjungjaya,



IYAN SUKMANA, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19660606 199701 1 001